

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dekade terakhir, administrasi publik mengalami transformasi fundamental dari model *Old Public Administration* yang kaku menuju *New Public Governance*. Masalah perkotaan kontemporer bersifat lintas batas (*cross-boundary*) yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurut Ansell & Gash (2008), *Collaborative Governance* muncul sebagai respon terhadap kegagalan implementasi kebijakan yang bersifat searah. Kolaborasi ini menekankan pada keterlibatan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang formal dan berorientasi pada konsensus.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, tantangan utama yang sering muncul adalah ketimpangan kekuasaan antar aktor. (Emerson & Nabatchi, 2021) dalam bukunya *Collaborative Governance Regimes* menjelaskan bahwa keterlibatan yang berprinsip (*principled engagement*) harus didasarkan pada penemuan bersama, definisi masalah yang disepakati, serta aksi kolektif yang inklusif agar kolaborasi tidak terjebak dalam formalitas administratif semata.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam menjaga integrasi nasional serta membentuk kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial, menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif sosiologis, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur

hubungan sosial antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa nilai ideologi nasional berperan penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat multikultural (Yudiatmaja, 2022).

Pancasila berperan sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang mencakup perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Seiring dengan perkembangan global, terjadi perubahan sosial yang signifikan akibat globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dari yang sebelumnya berbasis tatap muka menjadi berbasis virtual, yang pada akhirnya mendorong munculnya kecenderungan individualisme serta melemahnya solidaritas sosial. Studi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat menurunkan kualitas interaksi sosial apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai kolektif dalam masyarakat (Kurniawan, 2024). Selain itu, polarisasi sosial yang muncul akibat perbedaan pandangan yang semakin tajam juga menjadi tantangan utama dalam menjaga persatuan bangsa. Menurut Sunarto (2021), polarisasi sosial merupakan salah satu tantangan yang harus diantisipasi melalui penguatan nilai kebangsaan.

Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong mulai mengalami penurunan, yang tercermin dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk

memperkuat kembali internalisasi nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara *top-down* semata, melainkan memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai aktor.

Upaya penguatan tersebut tidak dapat dilakukan secara *top-down* semata, melainkan memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai aktor. (Emerson & Nabatchi, 2021) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor dalam proses implementasi. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu program. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menempatkan penguatan karakter bangsa sebagai prioritas pembangunan melalui RPJMN 2020–2024. Kebijakan ini menekankan pentingnya pembangunan manusia yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berbasis nilai Pancasila. Menurut (Rahmawati, 2021), pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan solidaritas sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial. Di Indonesia, tantangan integrasi sosial pasca-pandemi menjadi fokus utama pemerintah. Penguatan ideologi Pancasila tidak lagi dipandang sebagai indoktrinasi politik, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial. Program Kampung Pancasila bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat terkecil, yaitu Rukun Warga (RW). Secara legal, hal ini didukung oleh upaya

pemerintah dalam membumikan nilai-nilai luhur melalui aksi nyata yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi (BPIP, 2024).

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menginisiasi Program Kampung Pancasila melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025 tentang Satuan Gugus Tugas Kampung Pancasila yang ditetapkan pada 2 Juli 2025. Secara eksplisit, konsideran SK tersebut menegaskan bahwa program ini merupakan penyempurnaan dari Kampung Madani, yang diarahkan agar setiap rukun warga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, kebencanaan, sosial dan ekonomi, lingkungan dan persampahan, serta keamanan dan ketertiban (Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025 Tentang Satuan Gugus Tugas Kampung Pancasila, 2025).

Untuk mewujudkan proses kolaboratif sebagaimana tercantum pada lampiran satu SK ini yang secara formal membentuk Satuan Gugus Tugas yang tersusun dari empat satuan tugas operasional, yaitu Satuan Tugas Lingkungan, Satuan Tugas Kemasyarakatan, Satuan Tugas Ekonomi, dan Satuan Tugas Sosial Budaya. Keempat satuan tugas ini melibatkan aktor lintas sektor mulai dari kepala dinas, unsur perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga Ketua RW sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila di tingkat RW. Konstruksi kelembagaan ini secara inheren mencerminkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance* yang melibatkan partisipasi multi-aktor dalam suatu forum bersama. Menurut Ansell & Torfing (2021), pendekatan kolaboratif menjadi penting dalam menghadapi

permasalahan kompleks dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

Program ini juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kegiatan ekonomi berbasis komunitas menjadi salah satu indikator keberhasilan program ini. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan ekonomi. R. Putnam (2020) menegaskan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jaringan kepercayaan dan kerja sama. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi.

Kota Surabaya memiliki sejarah panjang dalam pemberdayaan kampung, mulai dari *Kampung Green and Clean* hingga *Surabaya Smart City*. Program Kampung Pancasila yang kini memiliki landasan hukum formal memiliki dimensi yang lebih luas, mengintegrasikan aspek ideologi dengan empat pilar operasional. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kampung harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan. Dalam sambutannya, sebagaimana dilansir pada Humas Pemerintah Kota Surabaya (2025):

Surabaya.go.id (2025)- "Kampung Pancasila adalah manifestasi dari kedaulatan warga. Di sini, kolaborasi antara Satgas, Kader Surabaya Hebat (KSH), dan pengurus RW adalah mesin penggerak untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara presisi."

Sumber: (<https://www.surabaya.go.id/berita/kampung-pancasila> diakses 10 Februari 2026)

Untuk memahami urgensi pendekatan kolaboratif tersebut, diperlukan gambaran kondisi sosial ekonomi Kota Surabaya secara lebih mendalam. Data

berikut menunjukkan dinamika pembangunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Indikator Strategis Kota Surabaya (2024–2026)

Indikator	2024	2025	2026 (Capaian Awal)
Pertumbuhan Ekonomi	5,52%	5,70%	5,87%
Angka Kemiskinan	4,65%	3,56%	< 3,50%
Prevalensi Stunting	4,8%	1,6%	Menuju 0%

Sumber: BPS Surabaya (2026); Dinkes Surabaya (2025); Diolah peneliti (2026).

Lokus penelitian ini, yaitu RW IV Kelurahan Ngagel Rejo, dipilih karena keunikannya dalam mempraktikkan kemandirian kolektif. Jika di banyak wilayah kolaborasi masih bersifat pasif (menunggu instruksi kelurahan), di RW IV Ngagel Rejo, proses kolaborasi berlangsung secara organik dan proaktif. Hal ini terlihat dari keberhasilan mereka mengelola dana sosial mandiri dan pemberdayaan UMKM melalui *Koperasi Merah Putih*. Menurut siklus kolaborasi Ansell & Gash (2008), tahap awal yang paling krusial adalah *Trust Building* (pembangunan kepercayaan), dan di Ngagel Rejo, kepercayaan ini dibangun melalui transparansi laporan kegiatan dan forum dialog tatap muka yang rutin dilakukan di Balai RW.

Keberhasilan RW IV Ngagel Rejo mendapat pengakuan langsung dari Wali Kota Surabaya. Saat meninjau wilayah ini pada Februari 2026, Wali Kota Eri Cahyadi secara resmi menetapkan RW IV Ngagel Mulyo sebagai *prototype* Kampung Pancasila untuk seluruh Kota Surabaya (Radar Surabaya, 2026). Apresiasi tersebut didasarkan pada capaian konkret yang dihasilkan melalui kolaborasi warga: dalam dua tahun, warga berhasil menghimpun donasi sosial mandiri hingga Rp 90,33 juta yang seluruhnya disalurkan kembali untuk kebutuhan

warga, mulai dari bantuan sembako, pembelian kursi roda lansia, hingga dukungan program sosial (Suara Publik News, 2026). Esensi Kampung Pancasila, menurut Eri Cahyadi, terletak bukan pada simbol atau papan nama, melainkan pada kepedulian sosial yang hidup di tengah masyarakat, di mana warga yang mampu menopang warga yang lemah (Radar Surabaya, 2026).

Capaian tersebut tidak terbatas pada pilar sosial semata. Dari sisi lingkungan, gerakan pilah sampah menjadi tulang punggung kemandirian kampung, dengan 452 rumah aktif memilah sampah dan hasil penjualan 3–3,5 ton sampah kering per bulan melalui Bank Sampah Guyub Sayekti, yang hasilnya digunakan untuk pengadaan CCTV, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan pendidikan. Selain itu, RW IV juga memiliki 48 titik *urban farming*, instalasi biopori, dan sistem keamanan terpadu (SISKAMDU) yang dikelola secara kolaboratif antara warga dan petugas keamanan (Suara Publik News, 2026). Ketua RW IV Ngagel Rejo, Endang Purwaningtyas, menegaskan bahwa pemilahan sampah dilakukan seluruh warga lintas usia dan dijadikan media untuk menjaga hubungan, keguyuban, dan gotong royong antara warga. Keberhasilan ini menjadi bukti empiris bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan melalui tindakan kolektif yang konkret dan terukur.

**Tabel 1. 2 Matriks Capaian Program Kampung Pancasila
di RW IV Ngagel Rejo**

Pilar Program	Hasil Nyata (Output)	Dampak pada Warga (Outcome)
Pilar Ekonomi	Pengelolaan Dana Sosial Mandiri (Rp 90,33 juta)	Jaring pengaman warga kurang mampu
Pilar Lingkungan	Pemilahan Sampah di 452 Rumah, 48 titik urban farming	Pendapatan tambahan (Bank Sampah Guyub Sayekti)
Pilar Sosial	Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Sinoman (santunan kematian)	Penurunan risiko stunting keluarga
Pilar Keamanan	SISKAMDU (Sistem Keamanan Terpadu), 8 titik CCTV	Rasa aman warga 24 jam

Sumber: Data Profil RW IV Ngagel Rejo (2026); Radar Surabaya (2026); Suara Publik News (2026); diolah peneliti (2026).

Menurut Fukuyama (2020), kepercayaan merupakan elemen utama dalam membangun modal sosial yang kuat. Kelurahan Ngagel Rejo, khususnya di wilayah RW IV, memiliki karakteristik sosiologis yang unik sebagai permukiman padat penduduk yang heterogen namun memiliki "modal sosial" (*social capital*) yang kuat. Modal sosial ini mewujud dalam budaya "keguyuban" yang telah teruji melalui berbagai program lingkungan sebelumnya. Sebagaimana dicatat dalam Bircu (2022), modal sosial dalam bentuk jaringan kepercayaan (*networks of trust*) merupakan pelumas bagi mesin kolaborasi pemerintahan di tingkat lokal.

Di RW IV Ngagel Rejo, kondisi awal sebelum program Kampung Pancasila diresmikan sudah menunjukkan adanya *pre-history of cooperation*. Warga telah terbiasa dengan pola kerja bakti rutin dan sistem pengamanan swadaya. Meskipun memiliki modal sosial yang kuat, RW IV Ngagel Rejo menghadapi tantangan

struktural berupa keterbatasan sumber daya finansial formal untuk menangani masalah kemiskinan dan stunting di wilayahnya. Ketidakseimbangan ini memicu kebutuhan akan *Collaborative governance*. Pemerintah Kota Surabaya memiliki otoritas dan anggaran, sementara warga RW IV memiliki pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan tenaga kerja sukarela. Berdasarkan data Profil RW IV Ngagel Rejo (2026), terdapat kesenjangan antara jumlah Usaha Mikro (UMKM) yang mencapai lebih dari 50 unit dengan akses permodalan perbankan. Kondisi awal inilah yang mendorong para aktor untuk bersepakat membentuk Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari pilar ekonomi Kampung Pancasila.

Dalam kondisi awal yang penuh tantangan, peran *Collaborative Leadership* menjadi krusial. Di Ngagel Rejo, kepemimpinan tidak bersifat instruktif, melainkan bersifat memfasilitasi. Tokoh masyarakat di RW IV berperan sebagai *honest broker* yang mampu menjembatani kepentingan warga dengan agenda Pemerintah Kota. Emerson & Nabatchi (2021) menekankan bahwa kepemimpinan bersifat kritis dalam menetapkan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Kepemimpinan di Ngagel Rejo berhasil mengubah potensi konflik horizontal menjadi energi kolaboratif, misalnya dalam penentuan penerima bantuan sosial yang dilakukan secara terbuka di Balai RW untuk menghindari kecurigaan antar warga.

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik modern, konsep *governance* telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan hierarkis menuju pendekatan kolaboratif. *Collaborative Governance* pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi antara aktor pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat dalam suatu forum bersama untuk mencapai tujuan publik. Afandi (2023) menyatakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan proses berbagi kekuasaan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan publik secara kolektif. Emerson et al. (2012) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* terdiri dari tiga komponen utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi.

Meskipun memiliki modal sosial yang kuat, RW IV Ngagel Rejo menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya finansial formal untuk menangani masalah kemiskinan dan stunting di wilayahnya. Ketidakseimbangan ini memicu kebutuhan akan *Collaborative governance*. Pemerintah Kota Surabaya memiliki otoritas dan anggaran, sementara warga RW IV memiliki pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan tenaga kerja sukarela.

Berdasarkan data Profil RW IV Ngagel Rejo (2026), terdapat kesenjangan antara jumlah Usaha Mikro (UMKM) yang mencapai lebih dari 50 unit dengan akses permodalan perbankan. Kondisi awal inilah yang mendorong para aktor (Ketua RW, PKK, dan Kelurahan) untuk bersepakat membentuk Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari pilar ekonomi Kampung Pancasila. Inisiatif ini merupakan bentuk *shared motivation* untuk memecahkan masalah ekonomi secara kolektif.

Dalam kondisi awal yang penuh tantangan, peran *Collaborative Leadership* menjadi krusial. Di Ngagel Rejo, kepemimpinan tidak bersifat instruktif, melainkan bersifat memfasilitasi. Tokoh masyarakat di RW IV berperan sebagai *honest broker* yang mampu menjembatani kepentingan warga dengan

agenda Pemerintah Kota. Emerson & Nabatchi (2021) menekankan bahwa: *"Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama."* Kepemimpinan di Ngagel Rejo berhasil mengubah potensi konflik horizontal menjadi energi kolaboratif. Misalnya, dalam penentuan penerima bantuan sosial, proses deliberasi dilakukan secara terbuka di Balai RW untuk menghindari kecurigaan antar warga. Hal ini menunjukkan bahwa *Starting Conditions* di Ngagel Rejo telah dikelola dengan baik melalui transparansi, sehingga mempermudah jalannya tahap kolaborasi selanjutnya.

Sementara itu, dampak dan adaptasi menunjukkan bagaimana hasil kolaborasi dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial. Dalam konteks empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks. Misalnya, penelitian Ahmad (2025) menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* mampu mendorong perubahan sosial melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan kepemimpinan yang efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan tersebut. Hal ini menjadi penting dalam konteks program berbasis masyarakat seperti Kampung Pancasila.

Collaborative Governance tidak selalu berjalan secara ideal. Bonny (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan antar aktor dan kurangnya kejelasan peran dapat menghambat terciptanya pemahaman bersama dalam kolaborasi. Waardenburg (2025) menyatakan bahwa *Collaborative Governance* memerlukan

sistem manajemen kinerja yang baik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Setiono (2025) menegaskan bahwa penelitian *Collaborative Governance* masih memiliki kesenjangan dalam konteks lokal dan komunitas, khususnya pada program berbasis nilai kebangsaan seperti Kampung Pancasila. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih spesifik pada level mikro, khususnya mengkaji bagaimana proses kolaborasi tersebut berlangsung secara nyata di tingkat Rukun Warga. Penelitian George (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kolaborasi dibandingkan faktor lainnya. Kepercayaan memungkinkan terjadinya komunikasi yang terbuka dan mengurangi potensi konflik antar aktor. Dalam konteks Kampung Pancasila, kepercayaan antar warga menjadi modal utama dalam membangun solidaritas sosial. Selain kepercayaan, kepemimpinan juga memiliki peran penting dalam *Collaborative governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Program Kampung Pancasila di Kelurahan Ngagel Rejo Kota Surabaya guna memahami dinamika kolaborasi antaraktor dalam implementasi program tersebut. Program ini, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025 pada lampiran pertama dan dibuktikan oleh capaian RW IV Ngagel Rejo yang telah ditetapkan sebagai *prototype* oleh Wali Kota, merepresentasikan sebuah arena empiris yang kaya untuk mengkaji dinamika *Collaborative Governance* berbasis komunitas dalam konteks penginternalisasian nilai-nilai Pancasila.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Program Kampung Pancasila di Kelurahan Ngagel Rejo Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Program Kampung Pancasila di Kelurahan Ngagel Rejo Kota Surabaya melalui tiga dimensi *Collaborative Dynamics* yang meliputi *principled engagement*, *shared motivation*, dan *Capacity for Joint Action* sebagaimana dikembangkan oleh Emerson et al. (2012).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam memperkaya kajian *Collaborative Governance* dalam konteks program berbasis nilai kebangsaan di tingkat komunitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji dinamika kolaborasi antaraktor pada program komunitas serupa di berbagai daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan mengenai *Collaborative Governance* dalam konteks program berbasis nilai kebangsaan di level komunitas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menerapkan teori dan pengetahuan yang didapatkan pada saat perkuliahan, khususnya dalam Program Studi Administrasi Publik.
- b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penunjang pendidikan dan sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan wawasan, khususnya bagi mahasiswa maupun akademisi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, terutama dalam kajian *Collaborative Governance* dan program berbasis komunitas di Indonesia.
- c. Bagi Pemerintah Kota Surabaya dan Pemangku Kepentingan Lainnya Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya, Kelurahan Ngagel Rejo, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Program Kampung Pancasila, khususnya dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan diambil guna memperkuat proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan program sehingga capaian empat pilar program dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.